

# Desentralisasi Pendidikan melalui Kurikulum Muatan Lokal dalam Menjaga Kearifan Lokal di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Alya Sazkya<sup>1</sup>, Februati Trimurni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara,  
e-mail: [alyasazkya10@gmail.com](mailto:alyasazkya10@gmail.com)

## **Histori Naskah**

Diserahkan:  
04-07-2025

Direvisi:  
11-08-2025

Diterima:  
12-08-2025

## **Keywords**

: Decentralization of Education, Local Content Curriculum, Local Wisdom

## **ABSTRACT**

*Decentralization of education empowers the North Sumatera Provincial Education Office to develop a local content curriculum to preserve local wisdom amidst the currents of modernization and globalization. However, its implementation faces obstacles such as limited resources, low stakeholder participation, and a lack of school and teacher preparedness. This study aims to describe the implementation of educational decentralization through a local content curriculum in preserving local wisdom. The method used is descriptive qualitative with informants from the Education Office officials, principals, teachers, students, and parents. The analysis uses the Lindblom incremental model with three indicators: adjustment to community needs, continuous renewal, and actor participation. The results show that the normative authority of the provincial government has not been optimal. Some high schools do not implement local content due to a lack of policy socialization. Implementation is more through the Pancasila Student Profile Strengthening Project (P5) from the central government. Information transparency, provision of adequate resources, and increased community participation are needed for educational decentralization to effectively preserve local wisdom in North Sumatera.*

## **ABSTRAK**

Desentralisasi pendidikan memberi kewenangan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal guna menjaga kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, dan kurangnya kesiapan sekolah serta guru. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan desentralisasi pendidikan melalui kurikulum muatan lokal dalam menjaga kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informan dari pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Analisis menggunakan model inkremental Lindblom dengan tiga indikator: penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, pembaruan berkelanjutan, dan partisipasi aktor. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan normatif pemerintah provinsi belum berjalan optimal. Sebagian SMA tidak melaksanakan muatan lokal karena kurangnya sosialisasi kebijakan. Implementasi lebih banyak melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dari pusat. Diperlukan keterbukaan informasi, penyediaan sumber daya memadai, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar desentralisasi pendidikan efektif menjaga kearifan lokal di Sumatera Utara.

## **Kata Kunci**

: Desentralisasi Pendidikan, Kurikulum Muatan Lokal, Kearifan Lokal

## **Corresponding Author**

: Alya Sazkya

## PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk pada sektor pendidikan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah pusat dialihkan sebagian kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pembagian kewenangan ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi strategis dalam pengelolaan pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk mengembangkan kurikulum yang memuat kekhasan dan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Kurikulum muatan lokal menjadi instrumen penting dalam menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Melalui kurikulum ini, nilai-nilai budaya, tradisi, dan potensi daerah dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat relevan di daerah yang memiliki keragaman budaya, seperti Provinsi Sumatera Utara, yang dihuni oleh berbagai etnis, terutama Batak, Melayu, dan Nias. Namun, perkembangan teknologi dan arus globalisasi membuat generasi muda semakin terpapar budaya luar, yang berpotensi menggeser identitas lokal. Minimnya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan dapat memicu berbagai masalah sosial seperti intoleransi, tawuran pelajar, dan luntarnya nilai kebangsaan.

Di Sumatera Utara, kurikulum muatan lokal pada jenjang SMA sebagian besar diimplementasikan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Meskipun P5 memberikan ruang untuk mengangkat tema kearifan lokal, pelaksanaannya belum optimal. Tidak adanya regulasi khusus dari pemerintah provinsi yang mengatur muatan lokal secara komprehensif membuat sekolah tidak memiliki pedoman yang jelas. Selain itu, survei Kemendikbudristek (2022) menunjukkan bahwa 60% guru belum memahami pelaksanaan P5, hanya 40% yang pernah mengikuti pelatihan terkait, dan 70% siswa kurang antusias dalam pembelajaran berbasis proyek. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan melalui kurikulum muatan lokal belum sepenuhnya berjalan efektif di Sumatera Utara.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara belum maksimal mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang menjadi bagian dari proses desentralisasi pendidikan di Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus membahas dan menganalisis pelaksanaan kurikulum muatan lokal dalam menjaga kearifan lokal oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang akan dipandang sebagai adanya pemberian sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dengan perspektif administrasi publik. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam mengenai alasan kurang optimalnya kurikulum muatan lokal dalam menjaga kearifan lokal ditinjau dari desentralisasi pendidikan.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran permasalahan yang serupa. (Ridwan, 2021) menemukan bahwa desentralisasi pendidikan berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal, namun terkendala manajemen SDM dan partisipasi publik yang rendah. (Laili et al, 2023) menegaskan peran kurikulum berbasis kearifan lokal dalam pembentukan karakter, tetapi implementasinya kerap terganggu oleh kepentingan daerah dan lemahnya integrasi. (Darisman et al, 2023) menyoroti absennya regulasi jelas dalam pembelajaran bahasa daerah yang menyebabkan ketidakpastian kurikulum. (Nugroho et al, 2020) menunjukkan bahwa otonomi pendidikan memberi peluang adaptasi kurikulum, namun membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten. (Sofiani et al, 2024) menekankan bahwa kurikulum daerah dapat meningkatkan relevansi pembelajaran,

tetapi perlu penguatan kapasitas guru. (Hanggara, 2024) menilai desentralisasi dapat memperluas inovasi pendidikan, meski rentan pada ketimpangan antar daerah. (Siregar, 2021) dan (Fahinsa et al, 2024) juga mengidentifikasi rendahnya partisipasi siswa serta keterbatasan sumber daya guru dalam pelaksanaan P5 di Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini krusial untuk mengungkap permasalahan yang telah teridentifikasi melalui beberapa fenomena yang tidak ideal dan dapat menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Desentralisasi Pendidikan melalui Kurikulum Muatan Lokal dalam Menjaga Kearifan Lokal di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena desentralisasi pendidikan melalui implementasi kurikulum muatan lokal dalam pelestarian kearifan lokal di Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif yang kaya dan komprehensif, sehingga memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial secara utuh (Taylor dkk., 2015). Sumber data terdiri dari yaitu Data primer ialah diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Analisis Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, siswa, dan orang tua siswa. Data sekunder ialah mencakup dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan resmi, berita, hasil evaluasi pendidikan, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan instrumen. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis inkremental Lindblom (1979), yang memeriksa kebijakan publik melalui tiga indikator yaitu Penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan Masyarakat dengan melihat sejauh mana kurikulum muatan lokal disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. Peneliti berusaha untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tertentu secara lebih menyeluruh dan akurat. Penelitian ini akan menganalisis desentralisasi pendidikan melalui reformasi kurikulum lokal dalam upaya kearifan lokal, dengan mempertimbangkan beberapa dimensi seperti nilai, fakta, dan arahan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar data yang dikumpulkan berupa numerik, sementara ada juga data yang disajikan dalam gaya grafis. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan informasi yang dikumpulkan dari lapangan

Pembaruan berkelanjutan dengan menilai adanya inovasi dan pembaruan dalam kebijakan muatan lokal. Partisipasi aktor dan pemangku kepentingan dengan mengukur keterlibatan pihak sekolah, guru, siswa, orang tua, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kurikulum. Kerangka teori yang digunakan mengacu pada teori desentralisasi pendidikan (Fiske, 1996; Hannaway & Carnoy, 1993) untuk memahami pergeseran kewenangan dari pusat ke daerah, serta teori pelestarian kearifan lokal (Tilaar, 2002; Sibarani, 2012) untuk menganalisis peran pendidikan dalam mempertahankan identitas budaya. Data dianalisis secara induktif, di mana temuan lapangan digunakan untuk membangun pemahaman konseptual yang sesuai dengan realitas, yang kemudian diuji relevansinya dengan teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Kurikulum Muatan Lokal dalam Desentralisasi Pendidikan

Kurikulum lokal merupakan salah satu aspek terpenting dalam pendidikan, terutama dalam konteks desentralisasi. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberikan otonomi kepada setiap daerah dalam proses pendidikan yang disesuaikan dengan masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan pendidikan menjadi lebih bertanggung jawab. Berdasarkan hal ini, terdapat kewenangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggunakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan kurikulum lokal yang berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan pengetahuan dan adat istiadat lokal yang ada di Sumatera Utara ke dalam kurikulum sekolah.

Setiap sekolah diwajibkan untuk menerapkan kurikulum lokal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Implementasi kurikulum lokal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa masyarakat berhak atas pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, Pasal 36 menyatakan bahwa kurikulum harus dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan tujuan pendidikan, potensi daerah, dan jumlah siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kurikulum harus mempertimbangkan potensi lingkungan dan wilayah (Nugroho et al., 2020). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 37, kurikulum harus mencakup pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, perempuan dan budaya, olahraga, dan pengetahuan lokal.

Adanya kurikulum muatan lokal, memberikan kesempatan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki masyarakat multi-etnis, seperti adanya suku Batak, Melayu, Nias, dan Karo. Oleh karena itu, seharusnya kurikulum muatan lokal dapat meningkatkan keterampilan dan mengembangkan karakter siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan keunggulan lokal yang ada di Sumatera Utara.

Penerapan kurikulum lokal di Provinsi Sumatera Utara telah disederhanakan menjadi dua kurikulum yang berbeda: pembelajaran intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Mata pelajaran yang dicakup dalam pendidikan intrakurikuler antara lain pendidikan Islam/Kristen/Katolik/Buddha/Hindu/Khonghucu dan Budi Pekerti, pendidikan Pancasila, kemampuan berbahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam (biologi, kimia, dan fisika), ilmu pengetahuan sosial (biologi, ekonomi, sejarah, dan geografi), pengajaran bahasa Inggris, Seni dan Prakarya (musik/seni rupa/Seni Teater/Seni Tari/Prakarya dan Kewirausahaan), dan Muatan Lokal. Selain itu, Kurikulum Merdeka mencakup seluruh kurikulum lokal yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kearifan daerah. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Muatan Lokal merupakan mata pelajaran intrakurikuler yang bertujuan menggali dan melestarikan kearifan lokal di Sumatera Utara. Pemilihan jenis muatan lokal mengacu pada 1 dari 10 opsi yang diatur dalam peraturan daerah. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan kegiatan kokurikuler yang fokus pada penguatan karakter siswa melalui tema dan topik tertentu sesuai pedoman Kemendikbud. **P5** Tidak dikategorikan sebagai mata pelajaran muatan lokal, namun memiliki irisan nilai-nilai yang sejalan. Umumnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tematik dan ceremonial seperti pentas seni. Sekolah memilih 2–3 tema dari 7

tema yang tersedia. P5 berfungsi mendukung pembelajaran intrakurikuler, sedangkan muatan lokal secara langsung menjadi bagian dari struktur kurikulum sekolah. Meski memiliki tujuan berbeda, keduanya dapat saling melengkapi dalam pengembangan karakter dan pelestarian budaya.

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal melalui muatan lokal dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan, dalam hal ini adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menentukan jenis maupun tema kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Apabila muatan lokal maka terdapat sepuluh jenis, sehingga sekolah hanya cukup memilih satu saja, seperti seni atau prakarya. Sedangkan, pada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan dua sampai tiga tema. Namun, pelaksanaan kurikulum muatan lokal saat ini hanya dilakukan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) saja.



Gambar 1 Alur Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 1 menyatakan bahwa seluruh proyek Pancasila (P5) dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dimasukkan dalam Buku Panduan Pengembangan yang akan digunakan oleh Sekolah Menengah Atas untuk melaksanakan proyek tersebut. SMA Negeri 13 Medan akan melaksanakan Proyek Pendidikan Profil Pancasila (P5) yang:

1. Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan akan membentuk tim pelaksana Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) untuk seluruh kelas. Tim pelaksana terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, serta bisa juga mengikutsertakan siswa/i.
2. Identifikasi tahapan kesiapan sekolah oleh tim pelaksana, seperti ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Pada SMA Negeri 13 Medan, seluruh guru yang ada harus ikut serta dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Infrastruktur pendukung seperti proyektor di kelas juga telah disediakan oleh SMA Negeri 13 Medan untuk mendukung proyek ini.
3. Penentuan dimensi, tema, dan alokasi waktu oleh tim pelaksana. Penentuan dimensi dan tema akan didasarkan pada kondisi lingkungan dan kebutuhan siswa.

4. Modul yang diciptakan oleh waktu pelaksana atau tahapan umum yang menentukan subelemen (tujuan), topik, alur, dan durasi, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen.
5. Strategi pelaksanaannya meliputi pelaksanaan Proyek Pancasila (P5) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, penerbitan karya siswa, dan pelaksanaan evaluasi.

Agar pendidikan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu komponen sistem pendidikan adalah proses evaluasi kurikulum lokal. Keputusan kurikulum lokal membuka pintu bagi distrik untuk menyediakan materi pendidikan yang relevan dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip desensitisasi pendidikan, yang menunjukkan pentingnya lingkungan sekitar dalam perencanaan pendidikan. Dalam proses penentuan kurikulum lokal, fakta bahwa setiap distrik memiliki sejarah dan nilai-nilai uniknya sendiri menjadi titik tumpu. Lebih lanjut, landasan pengambilan keputusan kurikulum lokal dalam sosiologi adalah untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0 dan masyarakat massa 5.0. Lingkungan belajar yang saling terhubung yang menginspirasi imajinasi, menumbuhkan kreativitas, dan memotivasi siswa sangat diperlukan di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat massa 5.0. Selain menjadi aset berharga, faktor sosial, budaya, agama, etnis, ras, dan geografis dapat menimbulkan berbagai masalah. Dalam proses pemecahan masalah sosial melalui pendidikan, kurikulum berfungsi sebagai respons sekaligus kontribusi terhadap masalah-masalah tersebut. Kurikulum juga menekankan pentingnya lingkungan belajar yang fleksibel agar siswa dapat mempelajari hal-hal yang relevan dengan lingkungan sekitarnya dengan tetap mengedepankan keutamaan terkait agama, etika, dan pengabdian kepada masyarakat. Peserta dalam kurikulum lokal dilatih untuk mengetahui kehidupan dunia yang lebih baik, termotivasi untuk mempelajari beragam budaya yang ada, dan didorong untuk menciptakan kehidupan terbaik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berpusat pada pemerintah daerah untuk mengembangkan 20-30% konten berbasis potensi lokal, yang berhubungan dengan kebijakan kurikulum lokal. Selain itu, ada Peraturan Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Fakta bahwa kurikulum terdiri dari pembelajaran intra dan antar kurikulum tertuang dalam Pasal 7 Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Yang dimaksud dengan “pembelajaran intrakurikuler” adalah suatu jenis pendidikan yang berlangsung dalam konteks suatu kurikulum. Selain itu, pembelajaran intrakurikuler juga dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan diferensiasi, sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk menginvestasikan waktu yang cukup dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilannya. Di sisi lain, pembelajaran kokurikuler ekstrakurikuler dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran dengan tujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya dalam kegiatan kokurikuler intrakurikuler. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan prinsip pembelajaran interdisipliner yang menekankan pengembangan karakter dan kompetensi umum dalam pendidikan kuliner (Purnawanto, 2022; Shilviana & Hamami, 2020). Peraturan lain yang menjadi dasar implementasi kurikulum lokal adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi No. 262/M/2022 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi No. 56/M/2022 tentang Perluasan Pendidikan dalam Rangka Pendidikan Anak Usia Dini. Terdapat sedikit perbedaan antara peraturan ini dengan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.

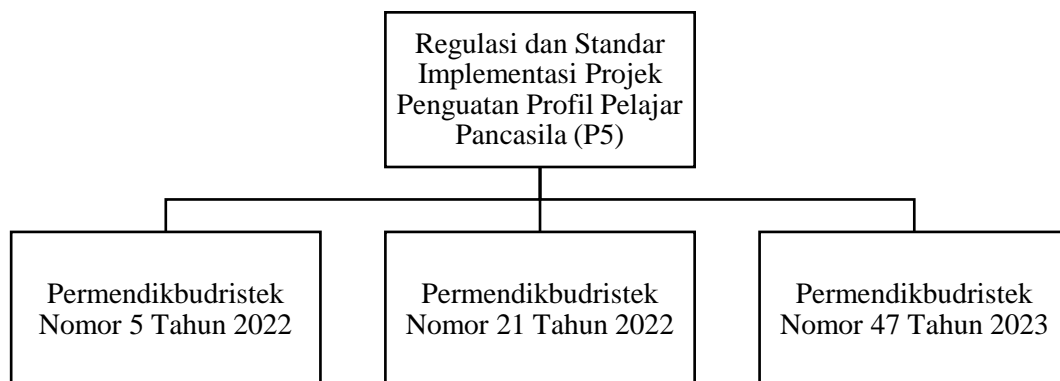
Evaluasi kurikulum lokal wajib diajukan ke Kurikulum Nasional, namun penetapan dan pengaturan kurikulum muatan lokal ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang dikembangkan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh guru dan staf bidang kurikulum SMA Negeri 13 Medan.

*“Muatan lokal itu direalisasikan berdasarkan peraturan dari daerah, kalau P5 itu realisasinya berdasarkan kemendikbudristek. Namun, pelaksanaannya saat ini muatan lokal tidak ada karena belum ada peraturan yang kami terima untuk pelaksanaannya.”*

(Wawancara Penelitian dengan Guru dan Staf Bidang Kurikulum SMA Negeri 13 Medan, 18 Maret 2025).

Berdasarkan hal ini, kurikulum lokal yang diajarkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Sumatera Utara hanyalah Profil Pelajaran Proyek (P5). Kurikulum lokal selanjutnya diimplementasikan dalam dua bentuk: kurikulum pembelajaran lokal dan Proyek Profil Pancasila (P5). Namun, belum ada peraturan daerah yang memungkinkan program pembelajaran bahasa daerah tersebut dilaksanakan. Terakhir, Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perluasan Pendidikan. Implementasi kebijakan migrasi lokal berbasis kurikulum di suatu kabupaten tidak hanya didasarkan pada peraturan daerah, tetapi juga memerlukan peraturan provinsi, seperti implementasi kebijakan migrasi lokal berbasis kurikulum di provinsi lain di luar Sumatera Utara.

Dengan demikian, kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan dasar regulasi sebagai berikut.



Gambar 2. Regulasi dan Standar Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

*Sumber: Diolah Peneliti dari Hasil Wawancara Penelitian, 2025*

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMA berlandaskan tiga regulasi utama. Pertama, regulasi mengenai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang menilai kelulusan siswa berdasarkan tiga aspek: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesesuaian karakter dengan nilai-nilai Pancasila, serta kompetensi literasi dan numerasi. Kedua, regulasi tentang Standar Penilaian yang mencakup penilaian formatif (misalnya UTS) dan sumatif (UAS). Ketiga, regulasi mengenai Standar Pengelolaan yang mengatur pelaksanaan refleksi bagi peserta didik, terutama bagi siswa yang perlu remedial pada penilaian formatif. Refleksi dapat dilakukan melalui portofolio, penugasan, atau bentuk evaluasi lain. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, anggapan bahwa siswa tidak tinggal kelas dijelaskan melalui mekanisme refleksi ini, sehingga perbaikan capaian belajar dilakukan tanpa harus mengulang tahun ajaran.

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan sebagai bagian dari desentralisasi pembelajaran yang selaras

dengan kebutuhan dan kearifan lokal. P5 mencakup enam dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia; berkebinekaan global dengan menghargai keragaman budaya; bergotong royong melalui kerja sama dan komunikasi; kreatif dalam menghasilkan gagasan dan karya; bernalar kritis dalam memperoleh serta mengolah informasi; dan mandiri dengan mengenali potensi diri serta menumbuhkan rasa percaya diri.

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan dimensi akan diserahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara kepada SMA Negeri 13 Medan. Dimensi yang dapat dipilih hanya 2 (dua) hingga 3 (tiga) dimensi saja per tahun. Artinya, pemilihan dimensi dapat dilakukan berulang pada tema yang berbeda dalam satu tahun. Pemilihan dimensi akan menyesuaikan tema yang akan dilaksanakan.

Beberapa topik telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi untuk Proyek Pengembangan Profil Pendidikan Pancasila (P5). 1. Gaya hidup berkelanjutan; 2. Kearifan lokal; 3. Bhinneka Tunggal Ika; 4. Bangunlah jiwa dan raganya; 5. Suara demokratis; 6. Kewirausahaan; (7) Rekayasa dan teknologi. Pada program Sekolah Menengah Pertama (SMA), ada dua hingga tiga kemungkinan tema.

## **B. Kurikulum Muatan Lokal dalam Menjaga Kearifan Lokal**

Kurikulum lokal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan menumbuhkan kebanggaan lokal, terutama dalam bidang desentralisasi pendidikan, yang memberikan panduan kepada pemerintah kabupaten dalam mengembangkan kurikulum yang memenuhi karakteristik ekonomi dan kebutuhan masyarakat luas. Di provinsi Sumatera Utara, upacara lokal berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan lokal ke dalam proses pembelajaran formal, yang memungkinkan generasi muda untuk memahami, menghargai, dan menjalankan warisan budaya mereka sendiri. Salah satu aspek penting dari migrasi lokal adalah pelestarian dan penyebaran bahasa, budaya, dan tradisi yang mendefinisikan masyarakat Sumatera Utara. Karena itu, kurikulum budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan identitas keagamaan para pesertanya.

Kurikulum lokal membantu mengembangkan kecintaan terhadap alam dan kebanggaan masyarakat. Muatan lokal juga mencegah degradasi budaya akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, pengembangan muatan lokal di institusi pendidikan menjadi langkah strategis dalam menghadapi pergeseran nilai dan menjaga pelestarian falsafah daerah yang mulai tergerus oleh budaya asing. Dengan demikian, muatan lokal berperan sebagai sarana penting dalam regenerasi budaya dan pembentukan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Analisis Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara: “... Melalui muatan lokal maka semua potensi lokal dan kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara bisa digali, tentunya tetap didasarkan kurikulum nasional sebagai standar pelaksanaannya.”

(Wawancara Penelitian dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Analisis Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 16 Mei 2025) Pernyataan tersebut didukung dengan: “Kurikulum muatan lokal berkaitan dengan kearifan lokal, dan kearifan lokal ini memang penting sekali untuk membantu siswa dalam melestarikan budaya kita yang ada disini (Sumatera Utara). Jadi, pelestarian nilai-nilai lokal melalui pendidikan memang perlu dilakukan. Agar generasi muda bisa paham soal makanan tradisional, pakaian adat, serta tarian tradisional yang ada di Sumatera Utara. Nilai-nilai kearifan lokal kita ini udah banyak yang tergerus karena globalisasi dan modernisasi, jadi

*kalau bukan dari pendidikan, dari mana lagi.” (Wawancara Penelitian dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 13 Medan, 30 April 2025)*

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Guru SMA Negeri 13 Medan: *“Pelaksanaan kurikulum muatan lokal, kalau dari P5 tema kearifan lokal itu membuat anak-anak dari setiap kelas bebas berkreasi untuk mengeksplor budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara. Kalau mereka memilih tampil dalam panen karya lewat makanan khas, maka itu dijual, jadi semacam ada bazaar.” (Wawancara Penelitian Guru SMA Negeri 13 Medan, 17 April 2025)*

Adanya muatan lokal juga dapat berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah dengan mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal. Contohnya, pengajaran tentang kerajinan tangan dan kuliner tradisional yang memanfaatkan sumber daya lokal memberikan peserta didik keterampilan praktis yang dapat mereka gunakan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, keberadaan muatan lokal menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola pendidikan secara mandiri dan responsif terhadap kebutuhan setempat. Pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan mendorong pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada peserta kearifan lokal namun juga pada kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

### **C. Desentralisasi Pendidikan Kurikulum Muatan Lokal dalam Menjaga Kearifan Lokal di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara**

Desentralisasi merupakan instrumen pemerintah daerah untuk mewujudkan otonomi daerah (Lionardo, 2011: 19). Oleh karena itu, desentralisasi merupakan kebijakan yang bersumber dari hibah kesejahteraan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengawasi pemerintah pusat. Langkah selanjutnya adalah otonomi daerah untuk bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaannya sendiri. Desentralisasi diterapkan untuk menghubungkan penduduk lokal dengan negara, secara kasat mata. Salah satu bentuk sentralisasi adalah sentralisasi di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi, baik di tingkat provinsi maupun kota. Namun, poin utama dari analisis ini adalah desentralisasi pendidikan sebagai hasil dari reformasi pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

“Desentralisasi dimaknai sebagai pembagian kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren dapat diartikan sebagai pembagian kewenangan pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, termasuk dalam bidang pendidikan. Adapun urusan pusat, yaitu pendidikan tinggi dan akreditasi. Urusan provinsi berada pada jenjang SMA, SMK, dan PK. Serta, urusan kabupaten/kota berada pada jenjang SD, SMP, dan pendidikan non formal.”

Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan: *...Proses pelimpahan kebijakan kurikulum muatan lokal dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah provinsi dapat dilihat melalui kurikulum. Terdapat tiga jenis kurikulum, yaitu Kurikulum Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), Kurikulum Standar Nasional, serta Kurikulum Muatan Lokal. Pada Kurikulum SPK dan Standar Nasional disusun oleh pemerintah pusat, yang diatur melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Sedangkan, kurikulum muatan lokal diberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk menggali kearifan lokal, potensi lokal, dan keunggulan lokal.” (Wawancara Penelitian dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Analisis Mutu*

Pendidikan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 16 Mei 2025)

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan mengawasi SMA, SKM, dan PK. Fokusnya adalah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang mengelola kurikulum lokal di tingkat sekolah menengah atas.

Kurikulum muatan lokal berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Adanya kewenangan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan agar setiap daerah memiliki karakteristik nilai budaya yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Artinya, terdapat tujuan untuk pemerataan pendidikan melalui pembelajaran kurikulum muatan lokal, agar setiap siswa pada setiap daerah mengenal budaya lokal dan kearifan lokal dari daerahnya masing-masing. Namun, pelaksanaan kurikulum muatan lokal ini juga tidak berjalan mulus, sehingga kebijakan ini menjadi penghambat bagi anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan nilai dan budaya lokal.

Desentralisasi, menurut Manan, adalah kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan pemerintah yang tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh unit-unit yang lebih kecil di daerah, sehingga daerah dapat mengelola dan melaksanakannya. Menurut studi tersebut, pemerintah provinsi telah menerima dana dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan sentralisasi pendidikan, terutama di sekolah-sekolah pedesaan. Namun, pada pelaksanaannya kurikulum muatan lokal pada tingkat SMA di Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan teori, karena kurangnya sumber daya yang memadai. Adapun sumber daya yang dimaksud kurang memadai berkaitan dengan ketersediaan guru dan tenaga pengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, peraturan daerah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kurikulum muatan pada masing-masing daerah, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Pada sisi lain, pemerintah menganggap bahwa adanya kurikulum muatan lokal sebagai kebijakan yang ideal agar pemerataan pendidikan tercapai melalui pembelajaran yang disesuaikan dengan nilai lokal pada masing-masing daerah.

Berdasarkan hal di atas, mengacu kepada model kebijakan inkremental menurut Charles E. Lindblom dalam bukunya yang berjudul "The Science of Muddling Through" (1959), bahwa terdapat proses pembuatan keputusan atau kebijakan yang bersifat tambal sulam. Artinya, kebijakan dibuat dengan perubahan sedikit demi sedikit dari kebijakan yang telah lalu. Mengacu pada teori tersebut, maka penelitian ini menggunakan indikator, seperti penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat, pembaruan berkelanjutan, serta partisipasi aktor dan pemangku kepentingan dalam menganalisis kebijakan kurikulum muatan lokal sebagai bentuk desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Teori ini didasarkan pada perubahan yang sedang berlangsung dalam dunia pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka yang menggunakan metode pembelajaran lokal dan Proyek Profil Pancasila (P5). Pada kurikulum pendidikan sebelumnya, tidak terdapat kurikulum lokal melalui Proyek Profil Pancasila (P5).

Tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk membantu masyarakat menyesuaikan layanan pendidikan mereka dengan kebutuhan dan keadaan penduduknya. Tujuannya adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan inklusif di semua bidang. Hal ini tidak akan memenuhi kondisi dan kebutuhan penduduk di setiap kabupaten ketika pendidikan dilakukan secara terpusat, yaitu, ketika semua kegiatan pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengembangkan kurikulum lokal merupakan salah satu bentuk desentralisasi dalam pendidikan. Hal ini dinyatakan dalam

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa kurikulum harus mempertimbangkan faktor lingkungan dan lokal (Nugroho, dkk., 2020). Selain itu, implementasi kurikulum lokal juga perlu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki akses mudah ke dunia luar melalui media sosial, sehingga mereka lebih mengenal budaya asing daripada budaya mereka sendiri (Mansur, 2012). Dalam pelaksanaannya, kurikulum lokal harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tenggara, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai sekolah, guru sebagai pedagog, dan siswa yang harus memenuhi persyaratannya.

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Provinsi Sumatera Utara dipahami sebagai bentuk desentralisasi pendidikan, namun tetap mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbudristek No. 56/M/2022. Kurikulum ini dilaksanakan melalui dua bentuk berbeda, yaitu muatan lokal yang bersifat intrakurikuler dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang bersifat kokurikuler. Agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik SMA, Dinas Pendidikan Provinsi terlebih dahulu mengidentifikasi kearifan, potensi, dan keunggulan lokal untuk dijadikan materi pembelajaran. Proses penyusunan kurikulum meliputi penetapan capaian dan tujuan pembelajaran, alur tujuan, serta bahan ajar, yang kemudian diajarkan baik sebagai mata pelajaran tersendiri maupun terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Penyusunan dilakukan oleh tim pengembang kurikulum yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru mata pelajaran.

Namun, berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemahaman Dinas Pendidikan Provinsi maupun pihak sekolah masih berada pada aspek teknis berupa identifikasi potensi daerah, penyusunan dokumen kurikulum, dan mekanisme implementasi. Padahal, pelaksanaan muatan lokal seharusnya tidak hanya menjadi media pembelajaran tentang potensi lokal semata, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai budaya lokal, seperti gotong royong, musyawarah, hormat kepada orang tua, nilai adat, dan tradisi lokal lainnya. Pada pelaksanaannya, hal-hal tersebut belum diintegrasikan dalam mata pelajaran muatan lokal. Selain dari pemahaman, penyesuaian kebutuhan siswa dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia berupa guru-guru, serta sumber dana yang memadai (Marliana & Hikmah, 2013). Berdasarkan hal tersebut, maka penyesuaian kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal untuk menjaga kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara dapat dilihat dari aspek-aspek di atas. Pertama, ketersediaan sarana dan prasarana yang menjadi kunci dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini meliputi kelayakan ruang kelas, modul atau buku pembelajaran, ruang seni, serta proyektor. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik dalam melaksanakan kurikulum muatan lokal pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pemenuhan kebutuhan siswa dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Provinsi Sumatera Utara diupayakan melalui penyediaan ruang kelas dan modul pembelajaran yang memadai. Materi muatan lokal terus dikembangkan dan disempurnakan seiring adanya inovasi baru, dengan buku ajar disiapkan dalam bentuk master atau soft copy oleh Dinas Pendidikan untuk kemudian digandakan oleh sekolah. Sementara itu, buku P5 diatur oleh Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum. Di tingkat sekolah, seperti di SMA Negeri 13 Medan, fasilitas yang tersedia meliputi sekitar 40 ruang kelas, perpustakaan untuk buku P5, serta proyektor sebagai penunjang pembelajaran. Namun, buku ajar muatan lokal saat ini tidak tersedia karena belum ada peraturan pelaksanaannya, meskipun hingga tahun 2021 masih

digunakan. Untuk kegiatan seni, sekolah memanfaatkan ruang paduan suara atau ruang kelas sebagai alternatif (Wawancara penelitian dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 13 Medan, 30 April 2025)

Oleh karena itu, penyediaan ruang kelas yang diawasi, proyektor, dan modul atau buku ajar merupakan penyediaan sumber daya dalam implementasi perubahan kurikulum lokal. Pembelajaran bahasa daerah dan Proyek Profil Pendidikan Pancasila (P5) harus dilaksanakan agar kurikulum dapat diselesaikan. Kurikulum sekolah seringkali memasukkan mata pelajaran senior, seperti praktik dan bisnis, dalam pembelajaran bahasa daerah. Namun, pendidikan sejarah lokal tidak dilaksanakan di sekolah karena belum ada peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang mendukung pelaksanaannya di sekolah. Hal ini mulai terjadi pada tahun 2022 dan berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dilakukan sekolah adalah menerapkan Profil Pelajaran (P5). Meskipun pembelajaran lokal dapat diintegrasikan secara mulus dengan pembelajaran terkait budaya lokal di Sumatera Barat, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) berbeda karena sekolah diwajibkan untuk mencakup dua hingga tiga tema dari total empat puluh lima tema. Di sisi lain, fadom lokal merupakan salah satu topik yang dapat diajarkan bersamaan dengan pelajaran agama. Oleh karena itu, untuk kelas X dan XI, sekolah menggunakan tema pahlawan lokal. Sekolah memiliki buku pembelajaran untuk mendukung pelaksanaan tersebut.



**Gambar 3. Modul Pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila**

*Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025*

Ketersediaan sumber daya manusia juga diperlukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan kurikulum muatan lokal. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah guru dan tenaga pendidik. Ketersediaan guru muatan lokal masih menjadi kendala karena terbatasnya anggaran sumber daya manusia. Akibatnya, pembelajaran bahasa daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan mata pelajaran lain, bahkan sering diajarkan oleh guru dari bidang studi berbeda. Pelaksanaan muatan lokal dilakukan secara bertahap, tidak langsung menerapkan seluruh jenis yang ada, sehingga pelatihan guru hanya dilakukan pada awal pengenalan muatan lokal baru. Jumlah guru yang dilatih disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, dengan rasio umum satu guru mengajar hingga 12 kelas.

Oleh karena itu, guru mata pelajaran lain terlibat dalam program ketersediaan guru untuk mengajar muatan lokal. Lebih lanjut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,

kurikulum bahasa daerah saat ini belum diterapkan oleh sekolah karena kurangnya peraturan dari kabupaten/kota maupun gubernur yang menjadi dasar penerapannya di sekolah. Oleh karena itu, sekolah menerapkan kurikulum daerah melalui Profil Pelajaran Proyek (P5).

*“... Untuk pelaksanaan P5 sendiri, semua guru wajib terlibat untuk memberikan materi ajar sesuai dengan tema yang sedang dijalankan. Total ada 95 guru disini yang mengajar pada berbagai bidangnya masing-masing. Namun, kalau dalam P5 ini semua guru tersebut juga harus memberikan materi ajarnya. Kami itu udah menyediakan modul dan materi untuk guru-guru tersebut, sehingga guru nanti tinggal menampilkannya saja kepada siswa. Kalau untuk mata pelajaran muatan lokal sebelum kurikulum merdeka ini, ada guru seni budaya atau kalau kita lagi memilih mata pelajaran prakarya biasanya dipilih guru yang mempunyai basic untuk mengajari mata pelajaran tersebut, walaupun guru tersebut sebenarnya bukan di bidang prakarya. Jadi, kalau pada kurikulum yang sekarang, semua guru ikut serta dari berbagai bidang.”* (Wawancara penelitian dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 13 Medan, 30 April 2025)

Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan berikut *“... Ada pelatihan untuk guru dalam pelaksanaan P5, sejauh ini yang dipilih biasanya yang belum terlalu tua, agar setelah pelatihan bisa berbagi ilmu dengan guru lainnya juga,”* (Wawancara penelitian dengan guru SMA Negeri 13 Medan, 24 April 2025)

Dengan demikian, ketersediaan guru dan tenaga pendidik dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal masih kurang memadai, karena anggaran yang tidak mampu untuk mengangkat guru khusus muatan lokal. Hal tersebut menjadi dasar bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan memberikan pendampingan dan pelatihan agar kurikulum muatan lokal dapat berjalan. Pelatihan tersebut akan dilakukan saat awal pemilihan muatan lokal jenis baru. Adapun jumlah guru yang ikut serta dalam pelatihan akan disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada di sekolah tersebut. Umumnya setiap sekolah memiliki sekitar 30 – 40 ruang kelas, sehingga biasanya guru yang dilatih dari masing-masing sekolah adalah satu sampai dengan dua orang guru.

Ketersediaan sumber dana berupa jumlah alokasi anggaran pendidikan. Sebagaimana pernyataan dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara: *“Anggaran untuk pelaksanaan kurikulum muatan lokal sangat minim, apalagi untuk program pengembangannya, biasanya anggaran tersebut digunakan untuk penyusunan muatan lokal, sehingga biasanya akan memerlukan bantuan dari pihak ketiga.”* (Wawancara Penelitian dengan Kepala Seksi Kurikulum dan Analisis Mutu Pendidikan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 16 Mei 2025)

Dengan demikian, ketersediaan sumber dana untuk pelaksanaan kurikulum muatan lokal oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara masih sangat minim. Hal tersebut menyebabkan pengembangan kurikulum muatan lokal menjadi terbatas, ketersediaan guru pelaksana muatan lokal yang tidak memadai, serta ketergantungan pada pihak ketiga. Di sisi lain, desentralisasi pendidikan seharusnya memperkuat kearifan lokal melalui kurikulum muatan lokal justru terhambat oleh minimnya ketersediaan sumber daya. Dimana desentralisasi bisa menjadi alat untuk melestarikan identitas budaya Sumatera Utara dengan mendorong konten pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal. Akibatnya, kualitas pendidikan berisiko mengalami stagnan, sementara upaya untuk melestarikan nilai-nilai lokal melalui pendidikan semakin sulit untuk dilakukan secara mandiri. Jika hal tersebut tidak diatasi, maka akan mengurangi relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat serta mengikis identitas budaya Sumatera Utara.

## **PENUTUP**

Provinsi Sumatera Utara memiliki kewenangan untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan melalui pengaturan kurikulum muatan lokal sesuai potensi dan kearifan lokal. Namun, hasil penelitian menunjukkan pelaksanaannya belum optimal karena SMA belum mengetahui adanya keputusan gubernur terkait muatan lokal, sehingga lebih memilih menerapkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang ditetapkan pusat. Hal ini menunjukkan ketergantungan pada pemerintah pusat akibat keterbatasan sumber daya dan pemahaman yang masih terbatas pada aspek teknis, belum menyentuh nilai kearifan lokal. Berdasarkan indikator Lindblom, penyesuaian dengan kondisi masyarakat terlihat dari fasilitas P5 yang memadai, namun materi muatan lokal belum tersedia dan guru masih kurang.

Pembaruan berkelanjutan berpeluang dilakukan, tetapi tetap bergantung pada pusat. Partisipasi masyarakat juga minim karena hanya melibatkan pihak sekolah dan dinas. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan perlu meningkatkan komunikasi dengan SMA terkait kebijakan muatan lokal, memperbesar anggaran untuk guru dan fasilitas, serta melibatkan siswa, orang tua, dan budayawan dalam pengembangan kurikulum. Optimalisasi desentralisasi pendidikan diharapkan mampu membangun identitas lokal tanpa mengabaikan prinsip kesatuan nasional, sehingga kearifan lokal Sumatera Utara tetap terjaga. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait pelaksanaan desentralisasi pendidikan melalui kurikulum muatan lokal dalam menjaga kearifan lokal, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara seharusnya lebih komunikatif kepada SMA mengenai kebijakan kurikulum muatan lokal, seperti keputusan gubernur yang telah ditetapkan. Selain itu, perlu peningkatan anggaran untuk pengadaan guru muatan lokal serta pengembangan fasilitas pendukung pembelajaran. Terakhir, perlu partisipasi dari siswa, orang tua siswa, serta budayawan dalam proses pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan dapat dioptimalkan untuk membangun identitas lokal, tanpa mengabaikan prinsip kesatuan nasional agar kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara dapat terjaga.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arlen., Safitri, A., & Trisoni, R. (2024). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Mutu Pendidikan. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(2), 308-317.
- Azkiya, S. (2023). *Implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMA Negeri 29 Jakarta* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13.
- Bida, O. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228-248.
- Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Darisman, T., Apriliya, S., & Saputra, E. R. (2023). Kebijakan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sunda di SD Wilayah Perbatasan (Borderland) Jawa Tengah. *Metodik Didaktik*, 18(2), 1-10.
- Darmadi, H. (2018). Educational management based on local wisdom (descriptive analytical studies of culture of local wisdom in west kalimantan). *Journal of Education, Teaching and Learning*, 3(1), 135-145.
- Endayani, H. (2023). Model Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal. *PEMA*, 3(1), 25-32.
- Fahinsa, F. R., Safarani, A. Z., Fitria, N., Saputra, M., & Sahliya, S. (2024). Pendampingan Projek P5 Melalui Program Asistensi Mengajar di SMA Laboratorium UM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1729-1737.
- Faturohman, O., Sudrajat, A., & Ghoer, H. F. (2022). Manajemen Kurikulum Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah untuk Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Sunda. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1233-1245.
- Ferdianto, V. B., & Rusman, R. (2019). Evaluasi implementasi kurikulum muatan lokal bahasa daerah dan pendidikan lingkungan hidup. *Jurnal penelitian ilmu pendidikan*, 11(2), 116-128.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9.
- Hanggara, G. S., & Khususiyah. (2024, August). Pendidikan Pluralistik Dalam Kurikulum Merdeka Belajar. In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 7, pp. 531-548).
- Izzah, I. (2024). Analisis Manifestasi Implementasi School Based Management pada Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di Lembaga Pendidikan. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 93-109.
- Kautsar, A. A., Sazali, H., & Manurung, A. S. (2025). Sentiment Analysis of Rapper Azealia Bank's Statement About "Indonesia is the World's Trash Can" on Social Media X (@azealiaslacewig). *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(2), 659.
- Laili, F. N., Fatkhurrozi, A., & Niâ, H. M. (2023). Melestarikan kearifan lokal melalui kurikulum pendidikan dalam membangun nilai karakteristik peserta didik. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(1), 417-432.
- Laily, M. K. M., Usman, A., & Hidayati, N. (2024). Penanaman karakter gotong royong melalui tema kewirausahaan dan kearifan lokal pada P5 kurikulum merdeka. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(3), 1-10.

- Maharani, A. I., Istiharoh, I., & Putri, P. A. (2023). Program P5 sebagai implementasi kurikulum merdeka: Faktor penghambat dan upayanya. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 1(2), 176-187.
- Maisyannah, M. (2018). Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan dan Relevansi School Based Management. *Quality*, 6(2), 1-13.
- Manurung, A. S., & Manurung, P. (2024). Tourism communication strategy in developing halal tourism in the Lake Toba tourism area of North Sumatra. *Jurnal Nomosleca*, 10(1), 128-142.
- Manurung, P., Saragih, A. H., & Hasibuan, P. (2024). A Study of the Philosophy of Education and Analysis of the Principles of Implementing Education according to the Al-Qur'an. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Nasir, M. (2023). Pengembangan kurikulum muatan lokal dalam konteks pendidikan islam di madrasah. *HUNAFI Jurnal Studia Islamika*, 10(1), 1-18.
- Nugroho, L. D., Pawestri, A., & Wardhani, I. S. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Kurikulum Muatan Lokal Budidaya dan Agribisnis Jagung. *Veritas et Justitia*, 6(2), 476-499.
- Nor, B., Djatmika, E. T., Widjaja, S. U. M., & Wahyono, H. (2022). Development of Economic Learning Model Based on Pancasila Values. *International Journal of Instruction*, 15(1), 259-276.
- Paranita, S. (2023). Nilai-Nilai Nuju Jerami Sebagai Sumber Pendidikan Dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bangka. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1992-1998.
- Purnawanto, A. T. (2022). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pedagogy*, 15(2), 76-87.
- Prayetno, M. S., Hrp, A. C. P., & Manurung, P. (2025). Efektifitas Layanan Konseling Individu Dengan Pendekatan Konseling Realitas Untuk Meningkatkan Perilaku Sopan Santun Siswa Fatherless (Anak Yatim) di SMP Karya Jaya Tanjung Morawa. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(1), 465-474.
- Rahmatih, A. N., Maulyda, M. A., & Syazali, M. (2020). Refleksi nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam pembelajaran sains sekolah dasar: Literature review. *Jurnal Pijar Mipa*, 15(2), 151-156.
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(1).
- Rohil, Z. (2016). Desentralisasi Pendidikan:: Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. *JOIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1), 155-166.
- Rosalia, F., & Kaguangan, D. (2024). Rasionalitas Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Provinsi Lampung (Kenyataan dan Harapan) The Rationality of Education Decentralization Policy in Lampung Province (Reality and Hope). *PERSPEKTIF*, 13(2), 339-346.
- Rummar, M. (2022). Kearifan lokal dan penerapannya di sekolah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(12), 1580-1588.
- Saraswati, D. A., Sandrian, D. N., Nazulfah, I., Abida, N. T., Azmina, N., Indriyani, R., ... & Lestari, I. D. (2022). Analisis Kegiatan P5 di SMA Negeri 4 Kota Tangerang sebagai Penerapan Pembelajaran Terdiferensiasi pada Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Mipa*, 12(2), 185-191.

- Shilviana, K., & Hamami, T. (2020). Pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. *Palapa*, 8(1), 159-177.
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan serta Implementasi dalam Pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1).
- Suminto, R. (2023). Pengaruh budaya global terhadap kearifan lokal di kalangan generasi muda. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 8(3), 78-85.
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41-51.
- Suryawan, I. P. P., Sutajaya, I. M., & Suja, I. W. (2022). Tri Hita Karana sebagai Kearifan Lokal dalam Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*, 5(2), 50-65.
- Syahril, A. (2024). *Pengaruh Menonton Konten TikTok@ buiramira terhadap Pengetahuan dan Motivasi Menyelesaikan Tugas Akhir pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Trimurni, F., & Mansor, N. (2020). Decentralization of public healthcare services in the Province of Sumatera Utara, Indonesia. *International Journal of Public Health*, 9(4), 364-372.
- Trimurni, F., PM, R. K., & Ginting, W. O. (2022, February). Bureaucracy challenges and prospects of transfer of authority to provide secondary education in North Sumatra Province. In *Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)* (pp. 139-147). Atlantis Press.
- Viola, M. A., Vilanti, F. A., Rahman, I. A., Masita, M., & Setiyadi, B. (2024). Analisis Kurikulum Berbasis Masyarakat: Memanfaatkan Kurikulum Muatan Lokal Untuk Pendidikan yang Kontekstual. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(1), 112-124.
- Wafiqni, N., & Nurani, S. (2019). Model Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(2), 255-270.
- Widiatmaka, P. (2022). Strategi menjaga eksistensi kearifan lokal sebagai identitas nasional di era disrupsi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 136-148.